

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**(studi empiris pada satuan kerja
perangkat daerah Kabupaten Sijunjung)**

Oleh :

Superdi

Pembimbing : M. Rasuli dan Alfiati Silfi

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : superdi.ardi21@gmail.com

*Influence of the presentation of financial report, accessibility and regional
financial accounting system to accountability of the
management of regional financial
(Study of SKPD Sijunjung regency)*

ABSTRACT

This study aims to research the influence of the presentation of financial report, accessibility and regional financial accounting system to accountability of regional financial management. The research was conducted on SKPD Sijunjung regency. The population in this study totaling 25 units working unit. Respondents in this study is the Head SKPD as users of the budget, the Head of Finance, Treasurer SKPD and parties that are directly related to the financial management of the Regional Government Sijunjung. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis and t test using SPSS. The results showed the presentation of financial statements, accessibility and regional financial accounting system affect the accountability of financial management with the value of determination (Adjusted R²) amounted to 60.9% while the remaining 39.1% be affected by other variables not examined in this study.

Keyword: accountability of the management of regional financial, the presentation of financial report, accessibility and regional financial accounting system

PENDAHULUAN

Di jaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demi

terciptanya hal itu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik.

Pada Kabupaten Sijunjung BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yaitu wajar dengan pengecualian (WDP). BPK masih menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. (BPK-RI, 2015)

BPK masih menemukan adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Masih terdapat adanya indikasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan yang belum menyeluruh di Pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Peggy, 2013).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat

untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Faktor lain yang juga diperlukan agar terciptanya akuntabilitas adalah aksesibilitas terhadap laporan keuangan. Sebab publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Lily, 2015).

Di lain hal, sistem akuntansi keuangan daerah juga mempengaruhi pengelolaan keuangan karena baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan

daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus (Boedi Prihandono 2009).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Sijunjung. (2) Untuk menguji aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Sijunjung. (3) Untuk menguji sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Sijunjung.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007;126).

Menurut Mardiasmo, 2009 akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. akuntabilitas public terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya

tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: 1) Relevan 2) Andal 3) Dapat 4) Dapat dipahami

Aksesibilitas

Menurut Mardiasmo (2009:171), laporan keuangan

pemerintah merupakan hak public yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggungjawaban public mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan:

”serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi computer.”

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peggy Sande (2013) menyatakan penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan accessible (Wahyuni, 2014).

Anies Iqbal Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Peggy Sande (2013) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

H2: Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung-jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Lily, 2015).

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah,

disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Halim 2013)

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Hasil penelitian Indra Kurnia (2013) menyebutkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dan hasil penelitian Lily (2015) menyatakan sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H3: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 25 SKPD. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dalam penelitian ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penata Keuangan (PPK), Bendahara dan auditor pemerintah pada Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Indikator untuk variabel Akuntabilitas keuangan antara lain adalah : 1) Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 2) pertanggung jawaban kepada public 3) terbuka, cepat dan tepat 4) penyusunan APBD 5) memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

Variabel Independen

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan (*independent variabel*) merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu; 1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan: 1) Terbuka di media massa 2) Mudah diakses 3) Ketersediaan informasi

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, inputnya adalah bukti atau dokumen seperti SP2D LS, SPJ dan BKU. Indikator untuk variabel ini adalah : 1) Basis Akuntansi; 2) Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran; 3) Penyusunan APBD ; 4) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai suatu data berupa nilai rata-rata

(mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Menurut Sugiyono (2009: 178), apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,3 dengan tingkat kepatuhan alpha 0,05 maka indikator tersebut dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan pengukuran dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah kumpulan. *Alfa cronbach* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. *Alfa cronbach* dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar-item yang mengukur konsep. Semakin dekat *alfa Cronbach* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2006: 177). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 adalah baik (Sekaran, 2006: 182).

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi antara variabel dependen (terikat) dan independen (bebas) masing-masing memiliki distribusi normal atau tidak yang mana hal ini dapat dilihat dengan menggunakan *normal probability plot*.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana variabel independen saling berkorelasi atau berhubungan satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinearitas antara variabel independen. Alat ukur yang digunakan adalah alat uji atau deteksi *Variance Inflation Factor* (VIF).

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang baik bebas dari heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antara kesalahan pada saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi maka akan digunakan uji Durbin-Watson.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis di uji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga didapatkan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

a : Konstanta

e : Variabel pengganggu (*error term*)

b₁b₂...b₃ : Koefisien regresi

X₁ : penyajian laporan keuangan

X₂ : aksesibilitas laporan keuangan

X₃ : sistem akuntansi keuangan daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat pengembalian kuesioner

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Sijunjung. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung kantor SKPD yang menjadi lokasi pengambilan sampel dan membagikannya kepada responden, rata-rata masing-masing SKPD menerima 3 set kuesioner kecuali

inspektorat daerah dengan 5 kuisisioner. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 77 kuesioner. kuesioner.

Tabel 1
Sampel dan Pengembalian
Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang dikirim	77	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	1	1,3%
Kuisisioner yang kembali	76	98,7%

Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat pada table 2 Statistik deskriptif yang menunjukkan angka minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 2
Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	76	24	40	34,63	2,828
Penyajian Laporan Keuangan	76	23	40	33,42	3,320
Aksesibilitas	76	10	25	18,76	4,098
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	76	20	35	29,07	4,199
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Nilai rata-rata kelima variabel tersebut lebih besar daripada standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *pearson correlation*.. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Dari hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS ketahui bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dari tabel tersebut terbukti bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.

Hasil Uji Reliabilitas Data

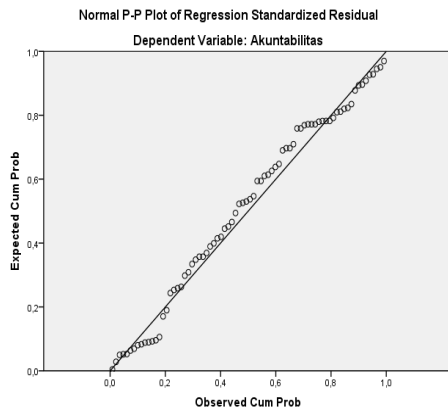
Uji reliabilitas dilakukan secara statistik sama seperti halnya pengujian validitas data. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *Cronbac'h Alpha* dengan bantuan SPSS 20 for windows. Jika nilai hitung *cronbac'h alpha* besar dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal). Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbac'h Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil uji normalitas data

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan normal *P-P Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penyajian Laporan Keuangan	0,561	1,783
Aksesibilitas	0,357	2,804
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,334	2,998

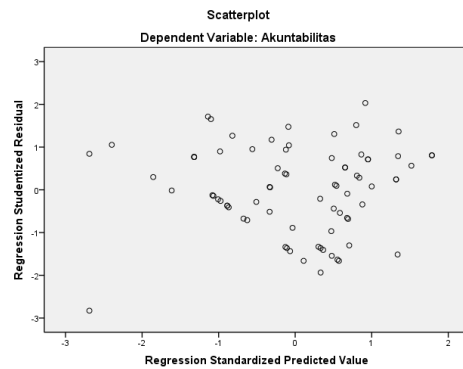
Sumber : Data primer olahahan, 2016

Dari tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan gambar hasil uji heterokedastisitas.

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas.



Sumber : Data Primer Olahan, 2016.

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3 dibawah ini menunjukkan hasil dari pengujian autokorelasi :

Tabel 3
Statistik Durbin-Watson

Durbin-Watson	N	Keterangan
1,495	76	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai d_{hitung} (*Durbin- Watson*) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,495 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel dibawah, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,624 dan nilai *Adjusted* R^2 sebesar

0,606. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 60,6%. Sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,790 ^a	0,624	0,609	1,769

Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis di uji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Maka hasil analisis regresi berganda akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	17,313	2,166	
X1	,194	,082	,228
X2	,209	,083	,302
X3	,238	,084	,353

Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 17,313 + 0,194X_1 + 0,209X_2 + 0,238X_3 + e$$

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan data dari Tabel 6 diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 ; 0,05/2 \\ &= 76 - 3 - 1 ; 0,05/2 \\ &= 72 ; 0,025 \\ &= 1,993 \end{aligned}$$

keterangan:

n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis

Hip.	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Ket.
H ₁	2,366	1,993	0,021	Diterima
H ₂	2,500	1,993	0,015	Diterima
H ₃	2,823	1,993	0,006	Diterima

Sumber : Data Primer Olahan, 2016

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melihat pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ dan $\text{sig.t} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ dan $\text{sig.t} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu

2,366 > 1,993 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (pada SKPD Kabupaten Sijunjung).

Berdasarkan hasil uji t, Penyajian Laporan Keuangan mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sig.t 0,021. Artinya, variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan sekaligus mengartikan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penyajian Laporan Keuangan aparat Inspektorat maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan hasil ini, sangat sejalan dengan hasil penelitian dari Peggy Sande (2013) yang menyatakan Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi semakin baik Penyajian Laporan Keuangan maka Akan semakin baik juga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah nya.

Hasil Pengujian Hipotesis H_2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melihat Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat

nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan sig.t < $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan sig.t > $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,500 > 1,993 dan sig.t (0, 015) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (pada SKPD Kabupaten Sijunjung).

Dari hasil ini sangat sejalan dengan penelitian dari Peggy Sande (2013) yang menyatakan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bertentangan dengan hasil penelitian Yuni Sastra (2013) aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Jadi hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik Aksesibilitas maka akan semakin baik juga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis H_3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melihat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan

untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,823 > 1,993$ dan $sig.t (0.006) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (pada SKPD Kabupaten Sijunjung).

Dengan hasil yang diperoleh tersebut, hasil ini sangat sejalan dengan penelitian dari Indra Kurnia (2013) bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Makin bagus penerapan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka semakin baik juga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini di buktikan dengan hasil t-hitung

2,366 yang lebih besar dari t-tabel 1,993. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Variabel aksesibilitas (X2) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini di buktikan dengan t-hitung 2,500 yang lebih besar dari t-tabel 1,993. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa semakin tinggi aksesibilitas maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3) Variabel Sistem akuntansi keuangan daerah (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini di buktikan dengan hasil t-hitung 2,823 lebih besar dari t-tabel 1.993. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yaitu: 1) Keterbatasan sampel yang hanya terfokus pada SKPD se Kabupaten Sijunjung. 2) Hanya terbatas pada tiga variabel independen, yaitu: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 3) Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuisioner, yaitu: terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas

dapat diberikan saran agar pemerintah Kabupaten Sijunjung lebih meningkatkan lagi pertanggungjawabannya dalam mengelola keuangan daerah dengan cara meningkatkan pemahaman tentang penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah serta lebih transparansi tentang laporan keuangan daerah dengan cara mengakses laporan keuangan daerah agar pihak yang berkepentingan dan masyarakat bisa melihat serta mengetahui hasil kinerja dari setiap unit-unit SKPD atau pemerintah daerahnya. Dengan demikian akan tercapainya *good governance* (pemerintahan yang baik sesuai amanat rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kurnia, Indra. 2013. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Lily.2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jurnal online mahasiswa Akuntansi Universitas Riau. Vol. 2 No. 2
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Musthofa, Anis Iqbal. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.1 No.1
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri, No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan
- Prihandono, Boedi. 2009. *Transparansi turut mendorong peningkatan akuntabilitas pengawasan*. Jurnal transparansi itjen-dephub Jakarta. Vol 4 No. 1 Hal 25-32.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.(Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal

Akuntansi Universitas Negri
Padang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan
daerah

Sastra, Yuni. 2013. *Pengaruh
Penyajian Laporan Keuangan
Dan Aksesibilitas Laporan
Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota
Medan*. Skripsi Universitas
Medan.

Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati Dkk
2014. *Pengaruh Penyajian
Laporan Keuangan Dan
Aksesibilitas Laporan
Keuangan Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten
Bandung*. Journal S1
Akuntansi Universitas
Pendidikan Ganesha. Volume
2 No. 1

Sekaran, Uma. 2011. *Research
Methods For Business,
Metodologi Penelitian untuk
Bisnis Buku I*. Jakarta:
Salemba Empat.

<http://www.sijunjung.go.id/>

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Bisnis*. Bandung: Alfabet.